



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2295 /SEK/OT1.7/IX/2026 Jakarta, 11 September 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pelaksanaan Survei Efektivitas Pengendalian Korupsi
Tahun 2026

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Mahkamah Agung;
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.01/S-230/D2/02/2026 tanggal 13 Agustus 2026 perihal Pelaksanaan Survei Efektivitas Pengendalian Korupsi Mendukung Penilaian SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga serta mendukung pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026 pada Mahkamah Agung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan survei efektivitas pengendalian korupsi pada pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dimaksudkan untuk memperkuat pembuktian tingkat efektivitas pengendalian korupsi dan mendukung nilai IEPK pada Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun 2026.
2. Cakupan populasi survei pada Mahkamah Agung RI meliputi 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon (UKE) 1 Mahkamah Agung RI dan seluruh Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, sebagaimana daftar terlampir.
3. Responden survei ditetapkan melalui mekanisme *random sampling* pada aplikasi PARIKSHANA (Pengukuran Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas) BPKP dari populasi pegawai pada unit kerja yang menjadi cakupan survei. Dengan demikian, tidak seluruh pegawai menjadi responden, melainkan pegawai yang terpilih sesuai mekanisme yang ditetapkan.
4. Data populasi pegawai untuk pelaksanaan survei telah dipersiapkan sesuai dengan cakupan unit kerja yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar keakuratan dan kemutakhiran data pegawai pada aplikasi SIKEP menjadi perhatian, khususnya data identitas, unit kerja, jabatan, dan alamat *email* aktif, guna mendukung kelancaran pelaksanaan survei.

5. Pegawai yang terpilih sebagai responden akan memperoleh *email blast* dari BPKP yang memuat tautan dan/atau token akses untuk mengikuti survei melalui aplikasi PARIKSHANA. Responden terpilih agar melakukan pengisian survei dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak penyampaian *email* tersebut, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BPKP.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Para Pejabat Eselon I dan Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk:
 - a. menyampaikan informasi pelaksanaan survei kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - b. memastikan informasi mengenai pelaksanaan survei dapat diterima dan dipahami oleh pegawai;
 - c. mendorong pegawai yang terpilih sebagai responden untuk mengisi survei secara lengkap, objektif, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dalam batas waktu yang ditetapkan; dan
 - d. memberikan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan survei di lingkungan unit kerja masing-masing.
7. Dalam hal terdapat kendala terkait data responden atau penerimaan *email*, agar dapat menghubungi Admin K/L Mahkamah Agung RI Sdr. Agus Sudarmanto (+62 821 23858534).
8. Pemantauan pelaksanaan survei pada aplikasi PARIKSHANA dilaksanakan oleh Admin K/L Mahkamah Agung RI sesuai kewenangan dan akses yang diberikan dalam aplikasi.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sobandi

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Pengawasan;
4. Plt. Kepala Badan Urusan Administrasi;

**CAKUPAN UNIT KERJA SURVEI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI
TAHUN 2026**

A. Unit Kerja Eselon I

No	Unit Kerja Eselon I
1	Kepaniteraan
2	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
4	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
5	Badan Urusan Administrasi
6	Badan Pengawasan
7	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

B. Pengadilan Tingkat Banding

Lingkungan Peradilan Umum

No	Nama Pengadilan Tinggi
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2	Pengadilan Tinggi Medan
3	Pengadilan Tinggi Padang
4	Pengadilan Tinggi Pekanbaru
5	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
6	Pengadilan Tinggi Jambi
7	Pengadilan Tinggi Bengkulu
8	Pengadilan Tinggi Palembang
9	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
10	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
11	Pengadilan Tinggi Banten
12	Pengadilan Tinggi Jakarta
13	Pengadilan Tinggi Bandung
14	Pengadilan Tinggi Semarang
15	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
16	Pengadilan Tinggi Surabaya
17	Pengadilan Tinggi Denpasar
18	Pengadilan Tinggi Mataram

19	Pengadilan Tinggi Kupang
20	Pengadilan Tinggi Pontianak
21	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
22	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
23	Pengadilan Tinggi Samarinda
24	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
25	Pengadilan Tinggi Manado
26	Pengadilan Tinggi Gorontalo
27	Pengadilan Tinggi Palu
28	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
29	Pengadilan Tinggi Makassar
30	Pengadilan Tinggi Kendari
31	Pengadilan Tinggi Ambon
32	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
33	Pengadilan Tinggi Papua Barat
34	Pengadilan Tinggi Jayapura

Lingkungan Peradilan Agama

No	Nama Pengadilan Tinggi Agama
1	Mahkamah Syar'iyah Aceh
2	Pengadilan Tinggi Agama Medan
3	Pengadilan Tinggi Agama Padang
4	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
5	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau
6	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
7	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
8	Pengadilan Tinggi Agama Palembang
9	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
10	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
11	Pengadilan Tinggi Agama Banten
12	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
13	Pengadilan Tinggi Agama Bandung
14	Pengadilan Tinggi Agama Semarang
15	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
16	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
17	Pengadilan Tinggi Agama Bali
18	Pengadilan Tinggi Agama Mataram

19	Pengadilan Tinggi Agama Kupang
20	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
21	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
22	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
23	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
24	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
25	Pengadilan Tinggi Agama Manado
26	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
27	Pengadilan Tinggi Agama Palu
28	Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat
29	Pengadilan Tinggi Agama Makassar
30	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
31	Pengadilan Tinggi Agama Ambon
32	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
33	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
34	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

Lingkungan Peradilan Militer

No	Nama Pengadilan Militer Tinggi
1	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
2	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
3	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
4	Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan
5	Pengadilan Militer Tinggi V Makassar

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Nama Pengadilan Tinggi TUN
1	Pengadilan Tinggi TUN Medan
2	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
3	Pengadilan Tinggi TUN Palembang
4	Pengadilan Tinggi TUN Surabaya
5	Pengadilan Tinggi TUN Mataram
6	Pengadilan Tinggi TUN Banjarmasin
7	Pengadilan Tinggi TUN Manado
8	Pengadilan Tinggi TUN Makassar

Keterangan: Responden ditetapkan melalui mekanisme *random sampling* pada aplikasi PARIKSHANA dari populasi pegawai pada cakupan unit kerja tersebut.